



BPS PROVINSI GORONTALO

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2019
(Unaudited)



Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 117 Telp. (0435) 834596, Fax. (0435) 834597
Homepage : <http://gorontalo.bps.go.id>, E-mail : bps7500@bps.go.id

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Gorontalo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 20 Januari 2020
Kepala,

Ir. Heran Fajarwati, MM
NIP. 196506111991032001



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	IV
Daftar Lampiran	-
Indeks Singkatan	V
Pernyataan Tanggung Jawab	VI
I. Ringkasan	VII
Ii. Laporan Realisasi Anggaran	IX
Iii. Neraca	X
Iv. Laporan Operasional	XII
V. Laporan Perubahan Ekuitas	XIII
Vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	-
A. Penjelasan Umum	-
A.1 Dasar Hukum	1
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	5
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4 Basis Akuntansi	8
A.5 Dasar Pengukuran	8
A.6 Kebijakan Akuntansi	9
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2 Belanja Negara	23
B.3 Belanja Pegawai	25
B.4 Belanja Barang	26
B.5 Belanja Modal	27
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	28
B.5.2 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	29
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	30
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	30
C.2 Persediaan	31
C.3 Tanah	33
C.4 Peralatan Dan Mesin	34
C.5 Gedung Dan Bangunan	36
C.6 Aset Tetap Lainnya	38
C.7 Akumulasi Penyusutan	39

C.8 Aset Tak Berwujud	39
C.9 Aset Lain-lain	41
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	42
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	43
C.12 Ekuitas	44
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	45
D.2 Beban Pegawai	46
D.3 Beban Persediaan	48
D.4 Beban Barang Dan Jasa	49
D.5 Beban Pemeliharaan	52
D.6 Beban Perjalanan Dinas	54
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	55
D.8 Kegiatan Non Operasional	56
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
E.1 Ekuitas Awal	58
E.2 Surplus/defisit-lo	58
E.3 Koreksi Menambah/mengurangi Nilai Ekuitas	58
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	59
E.3.2 Selisih Revaluasi Aset	59
E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60
E.4 Transaksi Antar Entitas	61
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	62
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	63
E.5 Ekuitas Akhir	64
F. Pengungkapan Lainnya	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	12
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4	Rincian Anggaran	18
Tabel 5	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja	19
Tabel 6	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	24
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja	24
Tabel 10	Perbandingan Belanja Pegawai	25
Tabel 11	Perbandingan Belanja Barang	26
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	27
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29
Tabel 15	Rincian Belanja Dibayar di Muka	30
Tabel 16	Rincian Persediaan	31
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	39
Tabel 18	Rincian Aset Tak berwujud	40
Tabel 19	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
Tabel 20	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	44
Tabel 21	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	45
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	46
Tabel 23	Rincian Beban Pegawai	47
Tabel 24	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	48
Tabel 25	Rincian Beban Persediaan	49
Tabel 26	Rincian Beban Barang dan Jasa	50
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	51
Tabel 28	Rincian Beban Pemeliharaan	52
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	53
Tabel 30	Rincian Beban Perjalanan Dinas	54
Tabel 31	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	55
Tabel 32	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	56
Tabel 33	Rincian Kegiatan Non Operasional	57
Tabel 34	Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	58
Tabel 35	Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi	59

Tabel 36 Rincian Revaluasi Aset Tetap	59
Tabel 37 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	60
Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	60
Tabel 39 Rincian Transfer Masuk	61
Tabel 40 Rincian Transfer Keluar	62


INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 20 Januari 2020
Kepala,

Ir. Herum Fajarwati, MM
NIP.196506111991032001



Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp117.346.537 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.246.086.104 atau mencapai 97,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.593.607.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.506.213.094 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.004.663.309; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.269.402.854; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp232.146.931.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp283.171.444 dan Rp25.223.041.650.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO

untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.437.537, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.030.439.345 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.023.001.808. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp108.522.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp15.914.479.808.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp26.635.407.616 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp15.914.479.808 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp-745.407.631 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.247.521.473 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp25.223.041.650.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019		% terhadap Anggaran	31 Desember 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	117.346.537	0,00	15.970.113
JUMLAH PENDAPATAN		0	117.346.537	0,00	15.970.113
Belanja Negara	B.2	16.593.607.000	16.246.086.104	97,91	18.529.738.359
Belanja Pegawai	B.3	7.318.502.000	7.277.640.645	99,44	7.078.824.221
Belanja Barang	B.4	7.783.655.000	7.477.135.459	96,06	10.043.136.138
Belanja Modal	B.5	1.491.450.000	1.491.310.000	99,99	1.407.778.000
JUMLAH BELANJA		16.593.607.000	16.246.086.104	97,91	18.529.738.359

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS Provinsi Gorontalo
NERACA
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	59.494.536	0
Persediaan	C.2	945.168.773	331.964.919
Jumlah Aset Lancar		1.004.663.309	331.964.919
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	4.861.957.000	4.861.957.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	14.462.133.255	14.707.177.581
Gedung Dan Bangunan	C.5	18.067.362.000	18.878.875.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	270.877.894	233.351.928
Akumulasi Penyusutan	C.7	(13.392.927.295)	(12.301.026.243)
Jumlah Aset Tetap		24.269.402.854	26.380.335.266
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	1.582.023.656	1.403.273.656
Aset Lain-lain	C.9	624.801.477	238.474.872
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(1.974.678.202)	(1.438.207.109)
Jumlah Aset Lainnya		232.146.931	203.541.419
JUMLAH ASET		25.506.213.094	26.915.841.604
KEWAJIBAN			

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	283.171.444	280.433.988
JUMLAH KEWAJIBAN		283.171.444	280.433.988
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	25.223.041.650	26.635.407.616
JUMLAH EKUITAS		25.223.041.650	26.635.407.616
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.506.213.094	26.915.841.604

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	7.437.537	3.065.400
JUMLAH PENDAPATAN		7.437.537	3.065.400
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.281.304.701	7.166.057.551
Beban Persediaan	D.3	539.566.435	428.603.214
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.435.994.743	4.412.827.008
Beban Pemeliharaan	D.5	351.176.352	308.235.842
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.316.722.279	4.577.676.561
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.105.674.835	2.291.387.301
JUMLAH BEBAN		16.030.439.345	19.184.787.477
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.023.001.808)	(19.181.722.077)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	109.354.000	11.609.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	935.715
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.703.250	2.385.411
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.535.250	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		108.522.000	13.059.196
SURPLUS/DEFISIT		(15.914.479.808)	(19.168.662.881)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Provinsi Gorontalo
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas awal	E.1	26.635.407.616	27.092.865.592
Surplus/defisit-LO	E.2	(15.914.479.808)	(19.168.662.881)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	(745.407.631)	40.237.685
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	37.525.966	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	(782.807.000)	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	(126.597)	40.237.685
Transaksi Antar Entitas	E.4	15.247.521.473	18.670.967.220
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	16.128.739.567	18.513.768.246
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	(881.218.094)	157.198.974
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1.412.365.966)	(457.457.976)
Ekuitas Akhir	E.5	25.223.041.650	26.635.407.616

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan Umum **A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

- Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
 35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
 36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
 37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
 38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-13/PB/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2019.

Entitas dan Rencana Strategis **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada

umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015-2019 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan_(stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS :

"Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua,"
("The Agent of Trustworthy Statistical Data for All")

Misi BPS:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan

oleh BPS dalam periode Renstra 2015-2019, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Program Generik ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA). Program Generik BPS ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi barang, dan kinerja aparatur BPS di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

BPS Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO (2) **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%
-------	---	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4

<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0	0
Pendapatan Denda	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	7.517.227.000	7.318.502.000
BELANJA BARANG	6.977.763.000	7.783.655.000
BELANJA MODAL	1.553.313.000	1.491.450.000
Jumlah Belanja	16.048.303.000	16.593.607.000

Tabel 5
Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja

Uraian	2019	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	9.533.465.000	9.460.386.000
BELANJA PEGAWAI	7.517.227.000	7.318.502.000
BELANJA BARANG	2.016.238.000	2.141.884.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	1.553.313.000	1.491.450.000
BELANJA MODAL	1.553.313.000	1.491.450.000
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.961.525.000	5.641.771.000
BELANJA BARANG	4.961.525.000	5.641.771.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	16.048.303.000	16.593.607.000

1. Revisi I (15 Januari 2019)

Revisi dalam rangka perubahan pada halaman IV DIPA untuk memenuhi permintaan KPPN Gorontalo dalam pencairan anggaran dengan perincian:

- Pembayaran Kekurangan Gaji atas kenaikan pangkat tahun 2018 untuk 1 orang sebesar Rp 771.504,00;
- Pembayaran tunggakan tunjangan kinerja desember 2018 untuk 50 orang sebesar Rp 276.806.584,00;
- Pembayaran langganan air bulan Desember 2018 sebesar Rp 1.235.900,00;

2. Revisi II (2 Mei 2019)

Revisi dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan BPS TA 2019

Berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS no. B-078/BPS/2000/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Revisi DIPA BPS TA 2019;

3. Revisi III (10 Juli 2019)

Revisi penghematan anggaran dalam rangka pemenuhan anggaran tunjangan kinerja 80 persen. Revisi berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS no. B-205/BPS/2000/06/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Revisi DIPA BPS TA 2019.

4. Revisi IV (26 Juli 2019)

Revisi pemenuhan belanja operasional kantor dan kegiatan perstatistikan. Revisi ini telah mengakomodir permintaan surat Deputi Bidang Statistik Produksi BPS no. B-031/BPS/05100/01/2019 tanggal

28 Januari 2019 perihal Kegiatan Statistik Tanaman Perkebunan Tahun 2019.

5. Revisi V (29 Agustus 2019)

Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan anggaran instrument SP2020.

6. Revisi VI (26 September 2019)

Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan tunjangan kinerja BPS tahap II berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS no. B-323/BPS/2000/09/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Revisi DIPA BPS TA 2019.

7. Revisi VII (31 Oktober 2019)

Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja pegawai berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS no. B-398/BPS/2000/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Revisi Belanja Pegawai.

8. Revisi VIII (28 November 2019)

Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dalam catatan halaman III DIPA.

9. Revisi IX (27 Desember 2019)

Revisi anggaran dalam rangka pemutakhiran POK untuk mengantisipasi adanya pagu minus tahun anggaran 2019.

Realisasi PNPB B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp117.346.537

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp117.346.537 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Rincian Pendapatan BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	0	116.709.937	0,00
Pendapatan Denda	0	81.600	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	555.000	0,00
Jumlah	0	117.346.537	0,00

Pendapatan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu berupa :

- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan Dinas Eselon II sebanyak 1 unit dan kendaraan Dinas Operasional sebanyak 1 unit dengan nilai total sebesar Rp.109.354.000
- Pendapatan yang berasal dari sewa berupa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp.7.355.937
- Pendapatan Denda berupa keterlambatan penagihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp.81.600
- Pendapatan lain-lain berupa pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar Rp.555.000

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019(Rp)	Realisasi 31 Desember 2018(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	116.709.937	14.674.900	695,30
Pendapatan Denda	81.600	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	555.000	1.295.213	(57,15)
Jumlah	117.346.537	15.970.113	634,79

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 634,79 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2018.

Kenaikan realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2019 dibanding Desember 2018 dikarenakan tahun 2019 terdapat pendapatan pemindahan BMN (lelang BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit serta pendapatan berupa denda.

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp16.246.086.104

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.246.086.104 atau 97,91 persen dari anggaran belanja sebesar Rp16.593.607.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	7.318.502.000	7.277.640.645	99,44
BELANJA BARANG	7.783.655.000	7.477.135.459	96,06
BELANJA MODAL	1.491.450.000	1.491.310.000	99,99
Jumlah Netto	16.593.607.000	16.246.086.104	97,91

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 cukup baik karena memenuhi target belanja Anggaran pada IKPA yakni 97,91%. Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.318.502.000 mampu direalisasikan sebesar Rp.7.277.640.645 atau sebesar 99,44%, Belanja Barang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.7.783.655.000 mampu direalisasikan sebesar Rp.7.477.135.459 atau sebesar 96,06%, Sedangkan Belanja Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.491.450.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.491.310.000 atau 99,99%.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 2019 dan 31 Desember 2018

Tabel Uraian	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	7.294.892.353	7.086.787.205	2,94
BELANJA BARANG	7.478.005.459	10.048.951.138	(25,58)
BELANJA MODAL	1.491.310.000	1.407.778.000	5,93
Jumlah Bruto	16.264.207.812	18.543.516.343	(12,29)
Pengembalian Belanja	18.121.708	13.777.984	31,53
Jumlah	16.246.086.104	18.529.738.359	(12,32)

Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 12,32 dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018.

Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 anggaran belanja barang untuk seluruh kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kab/Kota dibebankan pada DIPA BPS Provinsi Gorontalo seperti Kerangka Sampel Area, Survei Pertanian Antar Sensus, Ubinan, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan kegiatan Survei Biaya Hidup Tahun 2018, Sedangkan pada tahun 2019 anggaran belanja barang untuk beberapa kegiatan tersebut sebagian telah dibebankan pada masing-masing DIPA Kab/Kota..

*Belanja Pegawai
Rp7.277.640.645*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.277.640.645 dan Rp7.078.824.221. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.302.878.838	3.183.934.117	3,74
Belanja Lembur	97.016.000	152.424.000	(36,35)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.894.997.515	3.750.429.088	3,85
Jumlah Bruto	7.294.892.353	7.086.787.205	2,94
Pengembalian Belanja	17.251.708	7.962.984	116,65
Jumlah	7.277.640.645	7.078.824.221	2,81

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,81 persen dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Penambahan pegawai dari penerimaan CPNS tahun 2019 sebanyak 2 orang
- Kenaikan pangkat beberapa pegawai selama periode tahun 2019 sehingga gaji pokok dan tunjangan lain ikut bertambah
- Adanya kenaikan tunjangan kinerja PNS dari 70% menjadi 80% sesuai dengan Pepres No 99 Tahun 2018 yang sudah dibayarkan mulai tahun 2019

Belanja Barang
Rp7.477.135.459

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.477.135.459 dan Rp10.043.136.138.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	751.631.815	702.112.989	7,05
Belanja Barang Non Operasional	1.085.406.284	3.296.702.892	(67,08)
Belanja Barang Persediaan	1.218.822.949	627.020.727	94,38
Belanja Jasa	659.377.780	414.982.627	58,89
Belanja Pemeliharaan	445.174.352	424.640.342	4,84
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.317.592.279	4.583.491.561	(27,62)
Jumlah Bruto	7.478.005.459	10.048.951.138	(25,58)
Pengembalian Belanja	870.000	5.815.000	(85,04)
Jumlah	7.477.135.459	10.043.136.138	(25,55)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 25,55 dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018.

Hal tersebut disebabkan pada tahun 2019 kegiatan prioritas nasional telah dibebankan pada DIPA BPS Kab/Kota sedangkan pada tahun 2018 semua kegiatan prioritas nasional di BPS Kab/Kota dibebankan pada satker BPS Provinsi Gorontalo seperti Kerangka Sampel Area, Survei Pertanian Antar Sensus, Ubinan, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Survei Biaya Hidup Tahun 2018.

Belanja Modal
Rp1.491.310.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.491.310.000 dan Rp1.407.778.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.491.310.000	1.388.627.000	7,39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	19.151.000	(100,00)
Jumlah Bruto	1.491.310.000	1.407.778.000	5,93
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	1.491.310.000	1.407.778.000	5,93

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2019 sebesar 5,93 persen dibandingkan 31 Desember 2018 disebabkan oleh

Adanya penambahan pengadaan kendaraan dinas roda-4 untuk pejabat eselon II BPS Provinsi Gorontalo dan kendaraan operasional eselon III BPS Kab. Boalemo, BPS Kab. Gorontalo dan BPS Kab. Gorontalo Utara

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.491.310.000 dan Rp1.388.627.000.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.491.310.000	1.388.627.000	7,39
Jumlah Bruto	1.491.310.000	1.388.627.000	7,39
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	1.491.310.000	1.388.627.000	7,39

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2019, mengalami kenaikan sebesar 7,39 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2018 sebesar Rp1.388.627.000.

Pada tahun 2019 BPS Provinsi Gorontalo melakukan pengadaan 1 unit kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat eselon II BPS Provinsi Gorontalo dan pengadaan 3 unit kendaraan dinas roda 4 untuk operasional pada satker BPS Kab. Gorontalo Utara, BPS Kab. Boalemo dan BPS Kab. Gorontalo.

Seluruh pengadaan tersebut dilakukan melalui *e-purchasing* dan sistem pembayarannya sekaligus ke pihak ketiga.

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0.

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	19.151.000	(100,00)
Jumlah Bruto	0	19.151.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	19.151.000	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2018 sebesar Rp19.151.000.

Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan maupun pengembangan atas aset gedung dan bangunan pada tahun 2019, sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat pembangunan kanopi rumah dinas jabatan eselon II senilai Rp.19.151.000.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp59.494.536*

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp59.494.536 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	59.494.536	0
Jumlah	59.494.536	0

Dalam rangka kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) BPS Provinsi Gorontalo tahun 2019 melakukan penyewaan gudang untuk menampung seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kontrak sebesar Rp.65.000.000,- sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Kontrak dihitung mulai tgl 1 Desember 2019 dan berakhir tgl 30 November 2020 atau 366 hari, dan hingga laporan ini dibuat BPS Provinsi Gorontalo sudah menjalani 1 bulan kontrakan yaitu sebanyak 31 hari pada bulan Desember 2019, Sehingga masa kontrak tersisa 11 bulan di tahun 2020 atau 335 terhitung mulai tgl 1 Januari 2020 s.d 30 November 2020 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1. Desember 2019 s.d November 2020 yakni 366 hari
2. Januari 2020 s.d November 2020 yakni 335 hari = $65.000.000 : (366 \times 335)$
= **59.494.535,519**

3. Pembulatan dari hasil perhitungan sisa masa kontrak tersebut adalah Rp**59.494.536** sehingga nilai saldo akhir Belanja Dibayar Dimuka tahun 2020 BPS Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp.59.494.536

Persediaan
Rp945.168.773

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp945.168.773 dan Rp331.964.919. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Barang Konsumsi	945.168.773	329.342.919
Bahan untuk Pemeliharaan	0	2.622.000
Jumlah	945.168.773	331.964.919

- Barang konsumsi sejumlah Rp.946.168.773 merupakan sisa stok ATK, komputer supplies dan voucher kendaraan dinas roda-4 dan roda-2

Untuk rincian sisa stok barang persediaan tahun 2019 tersaji pada lampiran Laporan Persediaan per 31 Desember 2019 yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	331.964.919
Mutasi Tambah :	
Pembelian	1.315.442.949

Transfer Masuk	29.228.037
Total Mutasi Tambah :	<u>1.344.670.986</u>
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	542.188.435
Transfer Keluar	187.891.697
Koreksi Penyesuaian Persediaan	1.387.000
Total Mutasi Kurang :	<u>731.467.132</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>613.203.854</u>
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	945.168.773

Mutasi Tambah pada persediaan terdiri dari :

- Pembelian berupa pengadaan ATK, komputer supplies dan voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2
- Transfer Masuk berupa hasil cetakan kuesioner survei bidang statistik produksi (survei IMK, survei IBS, survei konstruksi dll) dan survei statistik distribusi seperti survei lembaga keuangan dari satker BPS RI

Koreksi Penyesuaian Persediaan timbul akibat kesalahan dalam pencatatan akun persediaan berupa kode atau jumlah. Sedangkan yang terjadi pada satker BPS Provinsi Gorontalo adalah koreksi pencatatan jumlah harga dari satker BPS RI yakni dokumen survei bidang statistik produksi.

Mutasi Kurang pada persediaan terdiri dari :

Pemakaian ATK, komputer supplies, voucher pertamax kendaraan dinas roda-4 dan roda-2, bahan kimia untuk pembersih seperti sabun cuci piring, pengharum ruangan, tisu serta cetakan dokumen dan kuesioner survei bidang statistik distribusi dan survei bidang statistik produksi. Transfer Keluar berupa pengiriman tinta/toner printer dan hasil cetakan dokumen dan kuesioner survei harga, survei keuangan pemerintah, survei IMK, survei IBS dan survei konstruksi yang dikirim ke satker BPS Kab/Kota.

Tanah
Rp4.861.957.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan Rp4.861.957.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per	
31 Desember 2018	4.861.957.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	<u>0</u>
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan 31	<u>4.861.957.000</u>
Desember 2019	

Aset berupa Tanah yang dikuasai BPS Provinsi Gorontalo yaitu terletak di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan rincian :

- Luas Tanah Bangunan Gedung Kantor adalah 2,382 M2 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II adalah 392 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III adalah 2.050 M2 terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL dilaksanakan pada tahun 2017. Semua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Peralatan dan
Mesin*
Rp14.462.133.255

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp14.462.133.255 dan Rp14.707.177.581. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	14.707.177.581
Mutasi Tambah :	
Pembelian	1.491.310.000
Transfer Masuk	936.539.328
Total Mutasi Tambah :	2.427.849.328
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(487.326.605)
Penghapusan	(256.499.980)
Transfer Keluar	(1.929.067.069)
Total Mutasi Kurang :	(2.672.893.654)
Kenaikan(Penurunan)	(245.044.326)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	14.462.133.255
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019	(12.190.431.359)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2019	2.271.701.896

Mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :

- Pembelian 1 unit fortuner untuk kendaraan jabatan eselon II sebesar Rp. 516.850.000,-
- Pembelian 3 unit toyota all new innova kendaraan operasional eselon III BPS Kab. Boalemo, BPS Kab. Gorontalo dan BPS Kab. Gorontalo Utara sebesar 3 unit @Rp.323.000.000 = Rp.969.000.000,-

- Transfer masuk berupa 1 unit kendaraan dinas roda-4 dari satker BPS Kab. Boalemo sebesar Rp. 244.785.500,- dan 1 buah Tablet PC dari BPS RI sejumlah Rp.12.500.000,-

Mutasi kurang peralatan dan mesin pada periode 30 Juni 2019 yakni Transfer Keluar terdiri dari :

- 1 unit kendaraan dinas roda-4 DM 658 yang dikirim ke BPS Kab. Boalemo
- Pengiriman 3 unit toyota all new innova kendaraan operasional eselon III ke satker BPS Kab. Boalemo, BPS Kab. Gorontalo dan BPS Kab. Gorontalo Utara sebesar 3 unit @Rp.323.000.000 = Rp.969.000.000,-

18 unit UPS, 32 PC unit, 2 buah Laptop dan 6 buah Note Book yang dikirim ke BPS Kab/Kota

*Gedung dan
Bangunan
Rp18.067.362.000*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp18.067.362.000 dan Rp18.878.875.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	18.878.875.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Koreksi Kesalahan Input IP	(782.807.000)
Total Mutasi Kurang :	(782.807.000)
Kenaikan(Penurunan)	(782.807.000)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	18.096.068.000

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019	(1.202.495.936)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2019	16.893.572.064

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang terhadap Aset Gedung dan Bangunan pada satker BPS Provinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan maupun pengembangan terhadap Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo selama tahun 2019.

Jenis Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo berupa :

- Gedung Kantor 1 unit yang luasnya 1,735 M2 dengan 4 Lantai senilai Rp.16.404.061.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen sebanyak 1 unit dengan luas 120 M2 dengan 1 Lantai senilai Rp.399.242.000 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, dan
- Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 6 unit dengan luas masing-masing per unit adalah 70 M2 dengan 1 Lantai dengan nilai total Rp.953.676.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Wonkaditi Kec. Kota Utara.

Semua Aset tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp270.877.894*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah Rp270.877.894 dan Rp233.351.928. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	233.351.928
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Masuk	37.525.966
Total Mutasi Tambah :	37.525.966
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	37.525.966
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2019	270.877.894
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019	0
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2019	270.877.894

Aset tetap lainnya berupa publikasi dari BPS RI sebanyak 410 buku

Reklasifikasi masuk berupa buku publikasi yang berasal dari BPS RI senilai Rp.37.525.966

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp13.392.927.295*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp13.392.927.295 dan Rp12.301.026.243. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	14.462.133.255	12.190.431.359	2.271.701.896
Gedung dan Bangunan	18.067.362.000	1.202.495.936	16.864.866.064
Aset Tetap Lainnya	270.877.894	0	270.877.894
Jumlah	32.800.373.149	13.392.927.295	19.407.445.854

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp1.582.023.656

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.582.023.656 dan Rp1.403.273.656. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2019

Uraian	Nilai Perolehan
Software	1.532.479.656
Lisensi	49.544.000
Jumlah	1.582.023.656

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	1.403.273.656
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	178.750.000
Total Mutasi Tambah :	178.750.000
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0

Kenaikan(Penurunan)	<u>178.750.000</u>
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	1.582.023.656
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019	(1.359.023.730)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2019	222.999.926

Mutasi tambah pada Aset Tak Berwujud yang berasal dari BPS RI yaitu berupa software komputer senilai Rp.178.750.000. Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tidak terdapat mutasi kurang untuk Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud yang dimiliki BPS Provinsi Gorontalo adalah berupa Software dan Lisensi.

*Aset Lain-lain
Rp624.801.477*

C.9 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp624.801.477 dan Rp238.474.872. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2018	238.474.872
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	487.326.605
Total Mutasi Tambah :	<u>487.326.605</u>
Mutasi Kurang :	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(101.000.000)
Total Mutasi Kurang :	<u>(101.000.000)</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>386.326.605</u>
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2019	624.801.477

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019	(615.654.472)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2019	9.147.005

Aset lain-lain sampai dengan periode 31 Desember 2019 mengalami perubahan berupa penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp. 487.326.605 yang berasal dari peralatan dan mesin berupa :

- Global Positioning System sebanyak 20 buah senilai Rp.47.388.000,
- Laptop sebanyak 4 buah senilai Rp.56.564.880,
- Note Book sebanyak 8 buah senilai Rp.162.628.347,
- 1 buah Printer senilai Rp.4.000.000, dan
- 1 buah Terminal senilai Rp.216.745.378.

Sedangkan untuk mutasi kurang berupa penghapusan BMN yang dihentikan sebanyak 1 unit Station Wagon senilai Rp.101.000.000,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp1.974.678.202*

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp1.974.678.202 dan Rp1.438.207.109. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	1.532.479.656	1.336.728.930	195.750.726
Lisensi	49.544.000	22.294.800	27.249.200
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	604.341.477	595.194.472	9.147.005
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	20.460.000	20.460.000	0
Jumlah	2.206.825.133	1.974.678.202	232.146.931

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp283.171.444

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp283.171.444 dan Rp280.433.988. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2019 dan 2018

Jenis	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	282.862.144	279.198.088
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	309.300	1.235.900
Jumlah	283.171.444	280.433.988

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga BPS Provinsi Gorontalo periode 31 Desember 2019 sebesar Rp.283.171.444, dengan rincian :

1. Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja sebanyak 50 Pegawai aktif dan 1 Pegawai yang telah memasuki masa pensiun pada bulan Januari 2020 dengan nilai total sebesar Rp.282.862.144,
2. Tagihan Langganan Air bulan desember 2019 dengan nilai tagihan sebesar Rp.309.300.

Ekuitas
Rp25.223.041.650

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.223.041.650 dan Rp26.635.407.616. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

ASET	Rp. 26.319.086.018
Kewajiban (Uang Kepada Pihak Ketiga)	Rp. (283.171.444)
Saldo Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2019	Rp. 26.035.914.574

Pendapatan
PNBP
Rp7.437.537

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.437.537 dan Rp3.065.400. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.355.937	2.845.400	158,52
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	220.000	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	81.600	0	0,00
Jumlah	7.437.537	3.065.400	142,63

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 142,63% dibanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian tarif sewa rumah dinas pejabat eselon II dan III sesuai dengan tarif semestinya. Disamping itu pada tahun 2019 adanya pendapatan dari denda penyelesaian pekerjaan yang di tahun sebelumnya tidak terdapat denda tersebut.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.355.937	7.355.937	0
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	81.600	81.600	0
Jumlah	7.437.537	7.437.537	0

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 7.437.537 yakni berasal dari :

1. Sewa rumah dinas eselon II dan III selama Januari s.d Desember 2019 sebesar Rp.7.355.937 dan
2. Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp.81.600.

Beban Pegawai
Rp7.281.304.701
1

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.281.304.701 dan Rp7.166.057.551. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 23
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	2.320.670.380	2.226.549.510	4,23
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.916	31.249	5,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	145.771.400	138.912.660	4,94
Beban Tunj. Anak PNS	45.549.682	39.668.298	14,83
Beban Tunj. Struktural PNS	280.955.000	280.955.000	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	9.486.948	8.102.320	17,09
Beban Tunj. Beras PNS	113.192.300	110.875.020	2,09
Beban Uang Makan PNS	312.652.000	304.188.000	2,78
Beban Tunjangan Umum PNS	60.005.000	64.000.000	(6,24)
Beban Uang Lembur	97.016.000	152.062.850	(36,20)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.895.973.075	3.840.712.644	1,44
Jumlah	7.281.304.701	7.166.057.551	1,61

- Penambahan pegawai dari penerimaan CPNS tahun 2019 sebanyak 2 orang
- Kenaikan pangkat pegawai sampai dengan periode 31 Desember 2019 sehingga gaji pokok dan tunjangan lain ikut bertambah
- Adanya kenaikan tunjangan kinerja PNS dari 70% menjadi 80% sesuai dengan Pepres No 99 Tahun 2018 yang sudah mulai dibayarkan tahun 2019

Tabel 24
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.320.670.380	2.321.333.980	(663.600)
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.916	32.916	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	145.771.400	145.837.760	(66.360)
Beban Tunj. Anak PNS	45.549.682	45.576.226	(26.544)
Beban Tunj. Struktural PNS	280.955.000	282.575.000	(1.620.000)
Beban Tunj. PPh PNS	9.486.948	9.486.948	0
Beban Tunj. Beras PNS	113.192.300	113.192.300	0
Beban Uang Makan PNS	312.652.000	312.652.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	60.005.000	60.020.000	(15.000)
Beban Uang Lembur	97.016.000	97.016.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.895.973.075	3.889.917.515	6.055.560
Jumlah	7.281.304.701	7.277.640.645	3.664.056

Selisih pada perbandingan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) beban pegawai meliputi kekurangan gaji pegawai dan tunjangan kinerja pegawai

*Beban
Persediaan
Rp539.566.435*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp539.566.435 dan Rp428.603.214. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,

termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Beban persediaan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 25,89% yang berasal dari kenaikan Beban Persediaan Konsumsi sebesar 26,36% dan penurunan dari Beban Persediaan Bahan Baku sebesar (100%). Kenaikan atas Beban Persediaan periode ini dikarenakan cadangan dan transfer persediaan ke Kabupaten/Kota lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	539.566.435	428.603.214	25,89
Jumlah	539.566.435	428.603.214	25,89

Beban Barang dan Jasa
Rp2.435.994.743

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.435.994.743 dan Rp4.412.827.008. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	605.445.815	555.309.989	9,03
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	840.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.166.000	7.023.000	2,04
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	139.020.000	138.940.000	0,06

Beban Bahan	706.555.284	855.369.892	(17,40)
Beban Honor Output Kegiatan	378.851.000	2.437.758.000	(84,46)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	3.575.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	258.384.429	253.911.628	1,76
Beban Langganan Telepon	3.983.951	6.656.599	(40,15)
Beban Langganan Air	17.317.800	23.986.900	(27,80)
Beban Sewa	7.605.464	0	0,00
Beban Jasa Profesi	87.100.000	28.400.000	206,69
Beban Jasa Lainnya	224.565.000	101.056.000	122,22
Jumlah	2.435.994.743	4.412.827.008	(44,80)

Perbandingan beban barang dan jasa periode 31 Desember 2019 dengan periode 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 44,80%, Hal ini disebabkan karena beban kegiatan perkantoran maupun kegiatan teknis tidak sebanyak periode sebelumnya termasuk didalamnya pengadaan bahan konsumsi untuk pelatihan serta honor output kegiatan untuk non organik. Kegiatan prioritas Nasional di tahun 2018 lebih banyak dibanding tahun 2019.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	605.445.815	605.445.815	0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.166.000	7.166.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	139.020.000	139.020.000	0
Beban Bahan	706.555.284	706.555.284	0
Beban Honor Output Kegiatan	378.851.000	378.851.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Langganan Listrik	258.384.429	258.384.429	0
Beban Langganan Telepon	3.983.951	3.983.951	0
Beban Langganan Air	17.317.800	18.244.400	(926.600)
Beban Sewa	7.605.464	67.100.000	(59.494.536)
Beban Jasa Profesi	87.100.000	87.100.000	0
Beban Jasa Lainnya	224.565.000	224.565.000	0
Jumlah	2.435.994.743	2.496.415.879	(60.421.136)

Selisih Nilai LO dan LRA muncul pada beban langganan air bulan desember 2019 sebesar Rp.926.600 dan Beban Sewa yaitu Gudang untuk kegiatan SP2020 sebesar Rp.59.494.536.

*Beban
Pemeliharaan
Rp351.176.352*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp351.176.352 dan Rp308.235.842. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 28
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.784.575	121.045.138	(46,48)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.769.777	161.475.204	75,74
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.622.000	6.564.500	(60,06)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	19.151.000	(100,00)
Jumlah	351.176.352	308.235.842	13,93

Pada periode ini, beban pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 21,48% dibanding periode sebelumnya terlihat pada tabel yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah beban pemeliharaan peralatan dan mesin, ini dikarenakan pada tahun ini adanya pemeliharaan lift kantor yang tahun sebelumnya tidak dilakukan.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.784.575	64.784.575	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.769.777	283.769.777	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.622.000	0	2.622.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	351.176.352	348.554.352	2.622.000

Beban pemeliharaan senilai Rp2.622.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Selisih pada tabel di atas merupakan jumlah beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan periode 31 Desember 2019. Tidak semua akun belanja dapat dibandingkan antara Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Belanja Persediaan pada LRA adalah total pagu akun persediaan sedangkan beban persediaan pada LO hanyalah persediaan yang terpakai.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp3.316.722.279*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.316.722.279 dan Rp4.577.676.561. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 30
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	854.131.583	522.585.455	63,44
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	285.150.000	933.750.000	(69,46)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.920.691.400	3.034.099.000	(36,70)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	256.749.296	87.242.106	194,30
Jumlah	3.316.722.279	4.577.676.561	(27,55)

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan jika dibanding pada periode sebelumnya yaitu sebesar 27,55%. Hal ini dikarenakan kegiatan survey yang termasuk dalam program prioritas Nasional pada periode tahun 2019 sebagian kegiatan tersebut sudah tidak lagi dibebankan pada DIPA BPS Provinsi Gorontalo melainkan sudah di bebaskan pada satker BPS Kabupaten dan Kota.

Tabel 31
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2019

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	854.131.583	854.131.583	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	285.150.000	285.150.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.920.691.400	1.920.691.400	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	256.749.296	256.749.296	0
Jumlah	3.316.722.279	3.316.722.279	0

Sampai dengan periode 31 Desember 2019 tidak terdapat selisih pada Nilai LO dan Nilai LRA.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.105.674.835*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.105.674.835 dan Rp2.291.387.301. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 32
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.351.292.865	1.646.641.363	(17,94)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	604.237.482	417.891.905	44,59
Beban Amortisasi Software	144.330.088	219.711.776	(34,31)
Beban Amortisasi Lisensi	4.954.400	4.954.400	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	860.000	2.187.857	(60,69)
Jumlah	2.105.674.835	2.291.387.301	(8,10)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp108.522.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	109.354.000	11.609.500	841,94
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	935.715	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	555.000	1.295.213	(57,15)

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.148.250	1.090.198	5,32
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2.535.250	0	0,00
Jumlah	108.522.000	13.059.196	731,00

Beban dan Pendapatan Kegiatan Non Operasional mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar 731,00 %

Hal ini terlihat pada tabel diatas yakni penjualan peralatan dan mesin berupa hasil lelang kendaraan dinas roda-4 serta beban penyesuaian nilai persediaan.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp26.635.407.616

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.635.407.616 dan Rp27.092.865.592.

Defisit LO
Rp15.914.479.808

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.914.479.808 dan Rp19.168.662.881. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp745.407.631 dan Rp40.237.685. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	37.525.966	0
Selisih Revaluasi Aset	(782.807.000)	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(126.597)	40.237.685
Jumlah	(745.407.631)	40.237.685

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp37.525.966

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp37.525.966 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap minus Rp782.807.000

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar minus Rp782.807.000 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi minus Rp126.597

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp126.597 dan Rp40.237.685. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Tabel 37
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2019*

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi(Rp)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.579.403
Gedung dan Bangunan	(28.706.000)
Jumlah	(126.597)

*) nilai minus pada tabel didefinisikan koreksi pada aset tersebut merupakan koreksi pengurangan

Transaksi Antar Entitas Rp15.247.521.473

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.247.521.473 dan Rp18.670.967.220. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 38
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	16.246.086.104	18.529.738.359
Diterima dari Entitas Lain	(117.346.537)	(15.970.113)
Transfer Keluar	(1.749.271.546)	(1.155.634.439)
Transfer Masuk	868.053.452	1.312.833.413
Jumlah	15.247.521.473	18.670.967.220

Transaksi antar entitas sampai dengan periode 31 Desember 2019 pada satker BPS Provinsi Gorontalo meliputi :

- Ditagihkan ke Entitas lain yakni realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar Rp.16.246.086.104
- Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa lelang kendaraan dinas, sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas, dan pengembalian kelebihan pembayaran dari pegawai yaitu sebesar Rp.117.346.537
- Transfer Keluar merupakan pengiriman barang konsumsi berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas roda-4 dan peralatan IT lainnya ke satker BPS Kab/Kota se Provinsi Gorontalo yaitu sebesar Rp.1.749.271.546
- Transfer Masuk merupakan penerimaan barang konsumsi dari satker Sestama berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin berupa 1 unit kendaraan dinas roda-4 dari BPS Kab. Boalemo yaitu sebesar Rp.689.303.452

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar minus Rp117.346.537 sedangkan DKEL sebesar Rp16.246.086.104.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp868.053.452. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.749.271.546.

Tabel 39
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2019

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
Sestama	Barang Konsumsi	29.228.037	0	29.228.037
Sestama	Peralatan dan Mesin	608.753.828	1.132.450	607.621.378
BPS Kabupaten Boalemo	Peralatan dan Mesin	327.785.500	275.331.463	52.454.037
Sestama	Software	178.750.000	0	178.750.000
Jumlah		1.144.517.365	276.463.913	868.053.452

Transfer Masuk :

- Transfer masuk Barang Konsumsi yang berasal dari BPS RI sebesar Rp.14.738.496 adalah berupa:
 - Instrumen IBS tahun 2019 senilai Rp.1.294.260,
 - Dokumen survei konstruksi senilai Rp.2.453.345,
 - Pedoman survei IMK triwulanan senilai Rp.2.875.400,
 - Dokumen kuesioner survei statistik keuangan senilai Rp.939.615,
 - Dokumen survei pertanian hortikultura senilai Rp.2.901.470,

- Dokumen survei pertanian tanaman pangan senilai Rp.3.468.678, Kuesioner kegiatan statistik peternakan senilai Rp.710.688,
- Kuesioner tahunan pencacahan kehutanan senilai Rp.95.040.
- Transfer masuk Barang Konsumsi yang berasal dari BPS RI sebesar Rp.14.489.541 adalah berupa:
 - Dokumen survei tahunan perusahaan industri manufaktur senilai Rp.736.175,
 - Kalender dinding, meja dan buku agenda senilai Rp.12.645.600,
 - Dokumen perikanan senilai Rp.307.450, Dokumen peternakan senilai Rp.704.616,
 - Dokumen kehutanan senilai Rp.95.700
- Transfer masuk Peralatan dan Mesin yang berasal dari BPS RI sebesar Rp.607.621.378 adalah berupa alat pengukur kadar air, alat bantu uji tumbuh, PC unit, tablet PC
- Transfer masuk Peralatan dan Mesin yang berasal dari BPS Kab. Boalemo sebesar Rp.52.454.037 adalah berupa Station Wagon dan Mini Bus

Tabel 40
Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2019

Entitas Tujuan	Jenis	Aset Ditransfer	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Kabupaten Gorontalo	Barang Konsumsi	56.945.931	0	56.945.931
BPS Kota Gorontalo	Barang Konsumsi	28.269.786	0	28.269.786
BPS Kabupaten Boalemo	Barang Konsumsi	25.702.699	0	25.702.699
BPS Kabupaten Pohuwato	Barang Konsumsi	25.526.676	0	25.526.676
BPS Kabupaten Bone Bolango	Barang Konsumsi	27.301.558	0	27.301.558
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Barang Konsumsi	24.145.047	0	24.145.047
BPS Kabupaten Gorontalo	Peralatan dan Mesin	421.158.581	11.221.787	409.936.794

BPS Kota Gorontalo	Peralatan dan Mesin	193.445.173	92.397.963	101.047.210
BPS Kabupaten Boalemo	Peralatan dan Mesin	574.003.029	142.385.552	431.617.477
BPS Kabupaten Pohuwato	Peralatan dan Mesin	123.851.634	26.523.720	97.327.914
BPS Kabupaten Bone Bolango	Peralatan dan Mesin	153.582.716	56.254.802	97.327.914
BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Peralatan dan Mesin	463.025.936	38.903.396	424.122.540
Jumlah		2.116.958.766	367.687.220	1.749.271.546

Transfer Keluar ke :

- BPS Kota Gorontalo berupa Barang Konsumsi senilai Rp.187.891.697
- BPS Kab. Gorontalo berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.409.936.794
yaitu :
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378, 2 buah UPS senilai Rp.2.447.690,
 - 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473,
 - 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945,
 - 3 buah PC unit senilai Rp.48.636.843,
 - 1 unit mini bus senilai Rp.323.000, 4 buah alat uji tumbuh senilai Rp.7.589.252
- BPS Kota Gorontalo berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.101.047.210
yaitu :
 - 3 buah PC unit senilai Rp.48.636.843,
 - 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945,
 - 2 buah PC unit senilai Rp.25.655.074,
 - 1 buah alat bantu uji tumbuh senilai Rp.1.897.313,
 - 3 buah PC unit senilai Rp.32.254.860,
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378,
 - 1 buah lap top senilai Rp.16.950.000,
 - 1 buah lap top senilai Rp.15.366.977, dan

- 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473.
- BPS Kab. Boalemo berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.431.617.477
yaitu :
 - 1 unit station wagon senilai Rp.83.000.000,
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378,
 - 2 buah UPS senilai Rp.2.447.690,
 - 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473,
 - 4 buah PC unit senilai Rp.64.849.124, dan
 - 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945,
- BPS Kab. Pohuwato berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.97.327.914
yaitu :
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378,
 - 2 buah UPS senilai Rp.2.447.690,
 - 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473,
 - 4 buah PC unit senilai Rp.64.849.124,
 - 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945, dan
 - 2 buah alat bantu uji tumbuh senilai Rp.3.794.626
- BPS Kab. Bone Bolango berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.97.327.914
yaitu :
 - 4 buah PC unit senilai Rp.64.849.124,
 - 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945,
 - 2 buah UPS senilai Rp.2.447.690,
 - 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473,
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378,
 - 3 buah PC unit senilai Rp.32.254.860, dan
 - 2 buah alat bantu uji tumbuh senilai Rp.3.794.626
- BPS Kab. Gorontalo Utara berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp.424.122.540 yaitu :
 - 1 buah note book senilai Rp.15.602.378,
 - 1 buah UPS senilai Rp.1.527.473,

- 4 buah PC unit senilai Rp.64.849.124,
- 2 buah PC unit senilai Rp.25.655.074,
- 1 buah PC unit senilai Rp.22.354.945,
- 1 unit mini bus senilai Rp.323.000,
- 4 buah alat uji tumbuh senilai Rp.7.589.252,

Ekuitas Akhir
Rp25.223.041.650

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.223.041.650 dan Rp26.635.407.616.

ASET	Rp. 26.319.086.018
Kewajiban (Uang Kepada Pihak Ketiga)	Rp. (283.171.444)
Saldo Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2019	Rp. 26.035.914.574

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Pada Satker BPS Provinsi Gorontalo terdapat kerja sama dengan instansi lainnya melalui Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik RI dengan Kedepatian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berupa kerja sama Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun Anggaran 2019 sesuai nomor : 03/PKS/PPKBPHK-1/01/2019 dan Nomor : 02.01.17/KS.P/18-I/2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan resume kerja samanya terlampir.
2. Pada pertengahan tahun 2019 BPS juga menerima kerja sama dengan Kenterian PAN-RB yaitu kerja sama Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB 20190) sesuai MOU Nomor: 403/PPK-D.I/PANRB/04/2019 dan PKS Nomor: 12.11.15/KS.P/18-IV/2019 Tgl 18 April 2019.
3. Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo dengan 2 (dua) buah rekening giro yaitu :
 - Rekening bendahara pengeluaran dengan nomor 0084288921 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-
 - Rekening bendahara penerimaan dengan nomor 0297238194 atas nama BPn 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir di rekening per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0. yang digunakan untuk menampung dana penerimaan negara.
3. Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan :

- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 439/PA/2018 tanggal 3 Desember 2018 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2019 di Wilayah Provinsi Gorontalo
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No. 447 Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Herum Fajarwati	Kuasa Pengguna Anggaran
Zainudin N. Taniyo	Pejabat Pembuat Komitmen
Wiesye J. Damal	Pejabat Penandatanganan SPM
Insen Sj. Kalay	Bendahara Pengeluaran

4. Pada bulan Juni 2019 terjadi perubahan pengelola anggaran yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) sesuai SK Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor 236 Tahun 2019 Tanggal 11 Juni 2019 menjadi :

NAMA	JABATAN
Herum Fajarwati	Kuasa Pengguna Anggaran
Rudi Cahyono	Pejabat Pembuat Komitmen
Zainudin N. Taniyo	Pejabat Penandatanganan SPM
Insen Sj. Kalay	Bendahara Pengeluaran